

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **II.1 TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk menunjang kualitas penelitian ini, maka peneliti menyajikan penelitian terdahulu sebagai pembandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang terdahulu dengan tema yang sama, penelitian terdahulu sendiri memiliki posisi yang penting dalam sebuah penelitian, oleh karena itu berikut ini peneliti uraikan secara singkat tentang penelitian terdahulu.

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Benny Rustandi(2012) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penempatan Guru Sekolah Dasar Terpencil Di Kabupaten Sintang”. Hasil penelitian ini adalah (a). Standard dan Sasaran Kebijakan Standard dan sasaran kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melakukan standard pemerataan guru-guru Sekolah Dasar untuk Daerah terpencil sudah berupaya memenuhi kekurangan guru-guru Sekolah Dasar

di Daerah terpencil. Selain itu kurang tegasnya Pemerintah Daerah dalam mengkaji tentang pemerataan guru-guru Sekolah Dasar terpencil menjadi penyebab juga. Oleh karena itu, dilakukannya pemerataan guru-guru Sekolah Dasar terpencil agar tidak terjadi kekurangan guru-guru Sekolah Dasar untuk Daerah terpencil. (b). Ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan penempatan guru Sekolah Dasar terpencil Dalam prosesnya guru yang telah dimutasikan ke Daerah terpencil jarang melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai guru dikarenakan fasilitas yang kurang memadai terutama rumah dinas, aksesibilitas jalan yang kurang memadai, dan berpisah dengan keluarga. Selain itu, Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam pemutasian karena kebutuhan guru untuk dimutasikan tidak seimbangan dengan Daerah yang memerlukan Komunikasi Organisasi Antar Pelaksana Dalam penempatan dan pemerataan guru Sekolah Dasar terpencil harus ada keterlibatan antara kedua instansi yang bersangkutan karena menyangkut kepentingan dalam kebijakan pemerataan guru Sekolah Dasar terpencil antar kecamatan. Oleh karena itu kerjasama antar instansi harus berjalan dengan baik

supaya penempatan dan pemerataan guru Sekolah Dasar terpencil tidak ada penghambat dari kebijakan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eroby Jawi Fahmi, pada tahun 2012 meneliti tentang Pendidikan, Masyarakat, Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul, Penelitian yang dilakukan Eroby bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Konsep dan Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya (RPA), Bantul, serta tinjauan pendidikan Islam terhadap Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA. Jenis penelitiannya sendiri adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan mengambil latar Rumah Pengetahuan Amartya. Subyek penelitian adalah responden yang terdiri dari Pendiri, Kepala Sekolah, Pengurus Sekolah/Yayasan, Dewan Guru, Orang Tua Didik, Anak Didik dan masyarakat sekitar RPA. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-induktif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ErobyJawi fahmi menunjukkan:

1. Latar belakang pendirian RPA; pertama, hak dasar untuk mendapatkan pendidikan; kedua, pendidikan yang bermutu hanya diperoleh kalangan kelas menengah ke atas saja; ketiga, masyarakat sekitar RPA didominasi dari masyarakat kelas bawah tidak dapat mengakses pendidikan bermutu.
2. Pengertian Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA, pertama, pendidikan yang tumbuh, digerakkan, dan dikelola oleh masyarakat; dan kedua, pendidikan yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
3. Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA, menyediakan akses memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin secara gratis, menumbuh kembangkan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat akan realitas sosial-politik-ekonomi dengan melibatkan mereka pada proses pendidikan, diharapkan kelak masyarakat mengambil alih, mengelola, dan menciptakan komunitasnya sendiri.

4. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA menekankan prinsip solidaritas, egaliter, kebersamaan, dan kaderisasi.
5. Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA. Dukungan (support), berbentuk dukungan moril, dan spirituil; Keterlibatan (involvement), berbentuk pengambilan keputusan pada penyeleksian siswa, pembuatan kurikulum, dan kegiatan lainnya di luar pembelajaran. Kemitraan (partnership), antara masyarakat sekitar dengan RPA terjalin hubungan kemitraan yang sejajar. Kepemilikan (full ownership), masyarakat belum secara penuh terlibat dalam hal kepemilikan. Masyarakat belum bisa mengendalikan semua keputusan tentang program-program RPA.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syah, Zainal Abidin (2009) dengan judul penelitian “Kebijakan penempatan guru di Pulau Terluar Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna. Hasil penelitian ini adalah, 1) Kebijakan penempatan guru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna merupakan upaya untuk

meningkatkan pemerataan guru di setiap daerah baik di ibukota kecamatan, maupun di desa-desa terpencil yang berada di Pulau Terluar, namun penempatan guru-guru tersebut baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan guru, dan belum seluruhnya berdasarkan kualifikasi tenaga pendidik, 2) Guru-guru yang ditempatkan di pulau terluar belum sepenuhnya melaksanakan tugas dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kehadiran guru dimana masih ditemukan sekolah yang kegiatan belajar mengajarnya tidak efektif karena guru tidak hadir, 3) Belum efektifnya kebijakan penempatan guru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : faktor kondisi wilayah, faktor motivasi guru dalam melaksanakan tugas, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor sarana dan prasarana. Berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat diberikan saran, yaitu : 1) Perlunya strategi dalam pengadaan dan penempatan guru, agar tidak terjadi penumpukan guru di satu wilayah saja, 2) Perlunya partisipasi dari masyarakat untuk turut mengawasi kebijakan penempatan guru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, 3) Sebaiknya Dinas

Pendidikan Kabupaten Natuna lebih meningkatkan pengawasan kepada para guru yang melanggar kode etik.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Meha, Agus Maramba 2013 dengan judul penelitian “Implementasi kebijakan pemerintah Daerah dalam penempatan guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur”. Hasil penelitian ini adalah. Dalam hal penempatan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur sudah ada komunikasi yang didalam Dinas Pendidikan dan juga dinas Pendidikan sudah membuat perencanaan kebutuhan guru untuk mengelola sekolah-sekolah mana yang memiliki kekurangan dan kelebihan guru. Dalam mewujudkan pemerataan guru, Dinas Pendidikan Sumba Timur juga berkomunikasi secara formal bersama pemerintah kecamatan, sekolah serta masyarakat, dalam hal menyampaikan atau menginformasikan kebutuhan guru yang diperlukan di sekolah. Di Kabupaten Sumba Timur untuk mendukung pelaksanaan kerja dinas pendidikan termaksud pengelolaan data pendidikan pada tingkat kecamatan serta dalam mengontrol kerja guru, akan di bentuk suatu Badan pembantu UPTD (unit pelaksanaan teknis Dinas) pada setiap kecamatan.

Dalam program ini juga ada beberapa kecenderungan guru-guru di Kabupaten Sumba Timur, kecenderungan yang paling menonjol adalah bahwa masih banyak guru yang ingin di tempatkan di Kota, kecenderungan lain juga dapat terjadi dimana guru guru yang di tempatkan di Sekolah Dasar yang jauh dari perkotaan, sering ditemukan absen atau jarang masuk sekolah. Sehingga sikap seperti ini akan menghambat implementasi program penempatan Guru di Kabupaten Sumba Timur.

Berikut ini peneliti sajikan data dalam bentuk tabel penelitian terdahulu dengan tema pendidikan.

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Benny Rustandi(2012)  Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan, Volume 1 nomor 1 tahun 2012, edisi perdana.	Implementasi Kebijakan Penempatan Guru Sekolah Dasar Terpencil Di Kabupaten Sintang	(a)kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melakukan standard pemerataan guru-guru SD untuk Daerah terpencil sudah berupaya memenuhi kekurangan guru-guru SD di Daerah terpencil. Selain itu kurang tegasnya Pemerintah Daerah dalam mengkaji tentang pemerataan guru-guru SD terpencil menjadi penyebab juga. (b). Ukuran dan Tujuan Kebijakan Dalam implementasi kebijakan penempatan guru SD terpencil Dalam prosesnya guru yang telah dimutasikan ke Daerah terpencil jarang melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai guru dikarenakan fasilitas yang kurang memadai terutama rumah

		<p>dinas, aksesibilitas jalan yang kurang memadai, dan berpisah dengan keluarga. Selain itu, Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam pemutasian karena kebutuhan guru untuk dimutasikan tidak seimbang dengan Daerah yang memerlukan Komunikasi Organisasi Antar Pelaksana Dalam penempatan dan pemerataan guru SD terpendek harus ada keterlibatan antara kedua instansi yang bersangkutan.</p>
<p>Eroby Jawi Fahmi Skripsi, UIN Sunan Kalijaga (2012)</p>	<p>Pendidikan, Masyarakat, Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul</p>	<p>Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di RPA; Dukungan (support), berbentuk dukungan moral, dan spiritual; Keterlibatan (involvement), berbentuk pengambilan keputusan pada penyetaraan siswa, pembuatan kurikulum, dan kegiatan lainnya di luar pembelajaran; Kemitraan (partnership), antara</p>

		<p>masyarakat sekitar dengan RPA terjalin hubungan kemitraan yang sejajar; Kepemilikan (full ownership), masyarakat belum secara penuh terlibat dalam hal kepemilikan. Masyarakat belum bisa mengendalikan semua keputusan tentang program-program RPA.</p>
<p>Syah, Zainal Abidin</p> <p>Thesis, Universitas Gadjah Mada,(2009)</p>	<p>Kebijakan penempatan guru di Pulau Terluar Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna</p>	<p>1)Kebijakan penempatan guru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna merupakan upaya untuk meningkatkan pemerataan guru di setiap daerah baik di ibukota kecamatan, maupun di desa-desa terpencil yang berada di Pulau Terluar, 2) Guru-guru yang ditempatkan di pulau terluar belum sepenuhnya melaksanakan tugas dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kehadiran guru dimana masih ditemukan sekolah yang kegiatan belajar</p>

		<p>mengajarnya tidak efektif karena guru tidak hadir, 3) Belum efektifnya kebijakan penempatan guru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : faktor kondisi wilayah, faktor motivasi guru dalam melaksanakan tugas, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor sarana dan prasarana.</p>
<p>Meha, Agus Maramba Thesis Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana FKIP-UKSW (2013)</p>	<p>Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur</p>	<p>Dalam hal penempatan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur sudah ada komunikasi yang didalam Dinas Pendidikan Dalam mewujudkan pemerataan guru, Dinas Pendidikan Sumba Timur juga berkomunikasi secara formal bersama pemerintah kecamatan, sekolah serta masyarakat, dalam hal menyampaikan atau menginformasikan kebutuhan guru yang diperlukan di sekolah. Di Kabupaten Sumba</p>

		<p>Timur untuk mendukung pelaksanaan kerja dinas pendidikan termasuk pengelolaan data pendidikan pada tingkat kecamatan serta dalam mengontrol kerja guru, akan di bentuk suatu Badan pembantu UPTD (unit pelaksanaan teknis Dinas) pada setiap kecamatan. Dalam program ini juga ada beberapa kecenderungan guru-guru di Kabupaten Sumba Timur, kecenderungan yang paling menonjol adalah bahwa masih banyak guru yang ingin di tempatkan di Kota.</p>
<p>Muhamad Yusuf ,Doctoral thesis, Universitas Padjadjaran.(2013)</p>	<p>Implementasi Kebijakan Penempatan Guru di Kabupaten Pisau Propinsi Kalimantan Tengah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penempatan guru pada sekolah-sekolah di daerah terpencil di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan</p>

		sebagaimana mestinya karena faktor ketidakjelasan rincian program dan teknis pelaksanaan, ketidaksesuaian budaya dan kebiasaan hidup sehari-hari, serta kurangnya kesungguhan para implementor menaati seluruh ketentuan dan belum bisa objektif dalam memberikan penilaian terhadap kelayakan permohonan guru pindah daerah tempat tugas.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masih banyak kendala didalam mengimplementasikan program penempatan guru yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ada di tabel adalah ada pada lokasi penelitian serta metodologi yang di pakai, penelitian ini juga melengkapi penelitian terdahulu seperti yang ada di tabel di atas, jadi penelitian ini akan menambah bahan kajian dalam implementasi kebijakan penempatan guru (kebijakan pendidikan).

## **II.2 KERANGKA TEORITIK**

### **II.2.1 Pengertian Implementasi kebijakan publik**

Sebelum melangkah lebih jauh pada tahapan pelaksanaan implementasi kebijakan berdasarkan dengan pelaksanaan program, serta lingkup kerjanya, peneliti akan memberikan pandangan dari beberapa ahli mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Sesungguhnya sebuah implementasi suatu kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, sehingga dikatakan merupakan tahapam dari proses setelah penetapan undang-undang. Selain itu mempunyai makna realisasi pelaksanaan secara langsung dengan objek kebijakan. Yang tentu berhubungan dengan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan tehnik bekerja yang secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain adalah fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (out put) maupun sebagai suatu dampak (outcame) (Budi Winarno, 2014:147). Sedangkan

Menurut pendapat Van meter dan Van Horn dalam Solichin (2001:65) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari kerangka teori para ahli tersebut, dalam kegiatan penelitian ini jelas bahwa setelah diberlakukannya sebuah kebijakan, Pemerintah Daerah mengambil inisiatif untuk segera menindaklanjuti bersama dengan partisipasi unsur – unsur yang termuat dalam isi kebijakan dengan melaksanakan sebuah Program Gerakan Desa Cerdas. Program dititik fokuskan dari aspek pendidikan dasar diwilayah pedesaan.

### **II.2.2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Di dalam pelaksanaan Kebijakan ada beberapa contoh model kebijakan seperti yang diuraikan dibawah ini :

### **II.2.2.1. Model Grindle (1980)**

Berdasarkan model – model implementasi terhadap sebuah kebijakan, terutama kebijakan public disini peneliti mengambil contoh berdasarkan model Grindle

Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variable besar yaitu, isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Suranto, 2014:32). Variable isi kebijakan mencakup:

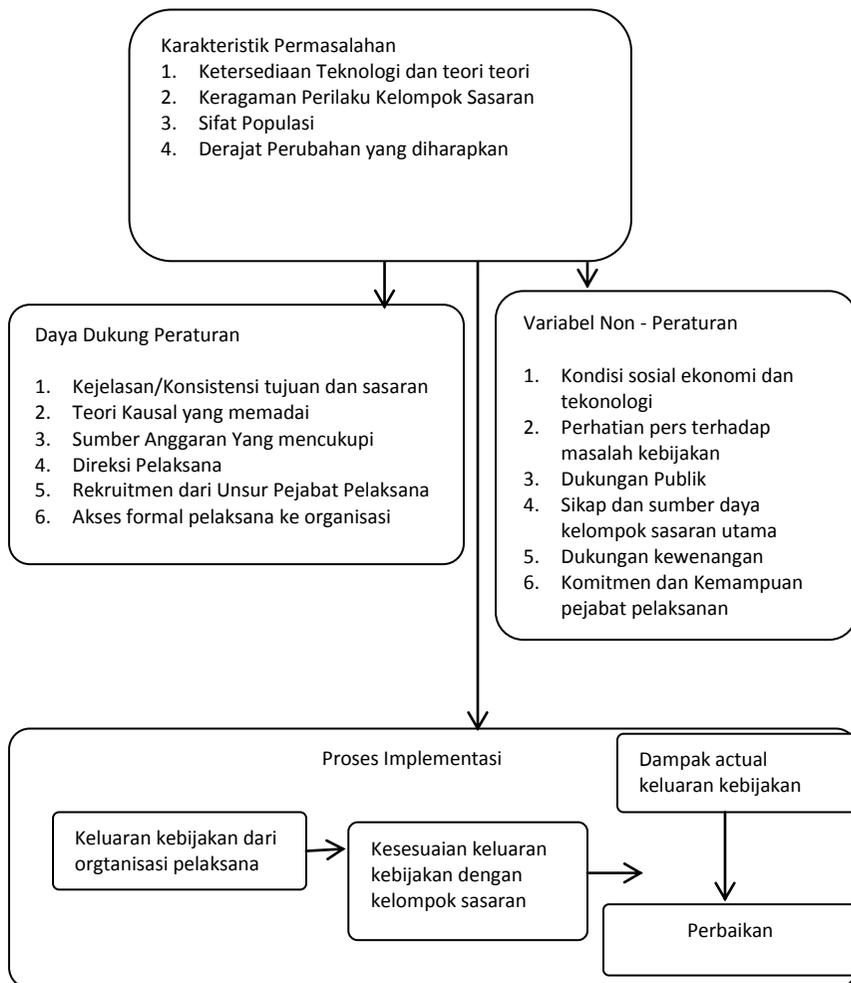
1. Sejauhmana dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang di terima oleh target groups
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat
5. Apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan implementatornya dengan rinci
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

#### **II.2.2.2. Model Sebatier dan Mazmanian**

Menurut Mazmanian dan Sebatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (tractability of the problems); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation); (3) variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation) (Subarsono, 2009:94). Variabel-variabel tersebut terlihat pada Gambar 2.4. Kerangka berpikir yang mereka tawarkan juga



Sumber : Samodra Wibawa : 1994:26

### **II.2.2.3. Model Proses Donal S. Van Meter dan**

#### **Carl E. Van Horn**

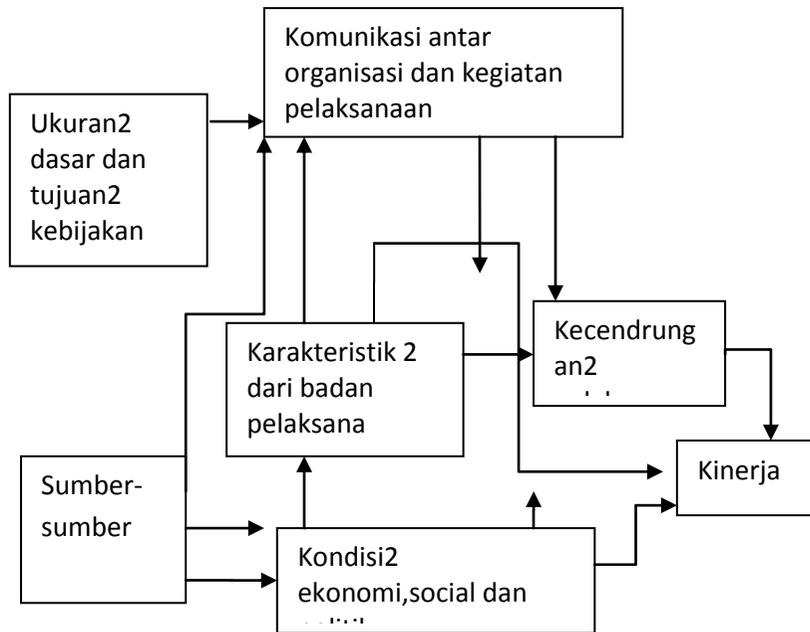
Van Meter dan Van Horn, dalam (Winarno, 2014:160), menamai model implementasi yang mereka rumuskan dengan model proses. Menurut pendapat Van meter dan Van horn, bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah ditetapkan. Model yang mereka tawarkan mempunyai enam variable yang membentuk ikatan antara program/kebijakan dan pencapaian. Enam Variabel tersebut adalah :

- 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan program. Identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.
- 2) Sumber-Sumber Kebijakan. Sumber layak mendapatkan perhatian karena sangat menunjang keberhasilan sebuah

program. Sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif

- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan dan sasarannya
- 4) Karakteristik agen pelaksana Mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi Implementasi suatu program.
- 5) Disposisi atau kecendrungan implementator. Dibedakan dalam tiga hal (a) respons implementator terhadap kebijakan; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan; (c) intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

- 6) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang ada baik sosial, politik dan ekonomi yang dimiliki masyarakat.



Gambar implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn,  
(Sumber, Winarno 2014:160)

Enam variable inilah bagi Van Meter dan Van Horn yang wajib didudukan secara jelas untuk menghasilkan sebuah pencapaian implementasi program yang berhasil, dengan sebelumnya mengidentifikasi karakteristik program degan cara melihat tingkat perubahan kebijakan dan tingkat consensus dari

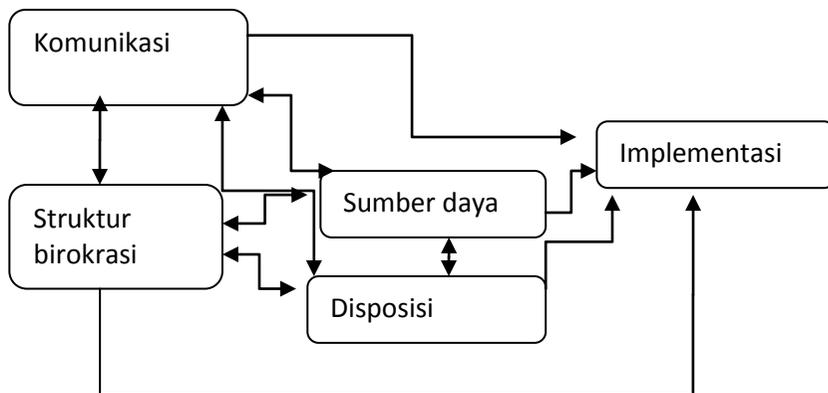
kebijakan itu. Semakin besar perubahan kebijakan dari program sebelumnya maka akan semakin sulit untuk di terapkan dan jika semakin tinggi eskalasi konflik yang dimiliki oleh sebuah program maka juga akan susah untuk diterapkan.

#### **II.2.2.4. Model George C. Edward III**

Model implementasi kebijakan yang bersifat *top down* menurut pandangan Edward III, (Mutiarin dan Zainudin, 2014:44), Implementasi kebijakan dipengaruhi empat Variabel dimana Keempat variabel saling berkaitan antara satu sama lain, yaitu:

1. Komunikasi. Ada tiga hal penting dalam proses komunikasi yakni : (1) transmisi, proses penyaluran pesan hingga penafsiran yang benar dari konseptor ke implementator. Jika baik transmisinya maka akan baik pula proses implementasinya. (2) Kejelasan, hal ini terkait dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan, (3) konsistensi, dimana tidak terjadinya perubahan-perubahan yang pada ujungnya akan mengaburkan jalannya implementasi.

2. Sumber-Sumber. Ada tiga sumber yang akan mendukung berjalannya implementasi yang efektif (1) staf yang berkualitas; (2) Informasi yang akurat; (3) Otoritas yang jelas.
3. Disposisi. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristi, sikap yang dimiliki oleh implementator kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan bersifat demokratis.
4. Struktur Birokrasi. Dibedakan dalam tiga hal (a) respons implementator terhadap kebijakan; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan; (c) intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.



Gambar implementasi menurut Model George C. Edward III  
(Sumber, Mutiari, Zainudin, 2014:44)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Grindhel sebagai alat untuk menganalisis Implementasi Program Gerakan Desa Cerdas di Kabupaten Halmahera Selatan.

### **II.2.3. Konsep Program Gerakan Desa Cerdas**

Dari uraian teori serta berbagai model bentuk implementasi kebijakan yang telah dipaparkan para ahli, kemudian muncul konsep pemikiran dari para penggagas program yang tertuang dalam program gerakan. Dengan mengacu pada kondisi yang melatarbelakangi sebuah keadaan dimana objek penelitian dilakukan, yang kemudian terbagi dalam dua pemikiran sebagai berikut :

#### **II.2.3.1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Bidang Pendidikan**

##### **II.2.3.1.1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut pendapat Widjaja (2003:169) *pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal*

untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pendapat tersebut didukung oleh Adisasmita (2006:35), dimana Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti:

1. *Aspek masukan atau input*, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) , dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi.
2. *Aspek proses*, seperti pelaksanaan, monitoring dan pengawasan.
3. *Aspek keluaran dan out put*, seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi.

Proses pemberdayaan masyarakat berarti kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial, ekonomi dan kemampuan politiknya yang sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki kedudukannya didalam kehidupan. Boleh dikatakan suatu proses dimana setiap usaha yang bersifat kepada tindakan dan kegiatan yang membimbing, mengarahkan, baik itu dari pola hidup, pemikiran dalam berperikehidupan kepada sebuah tujuan yang lebih baik. Segala proses kegiatan

tersebut, seperti yang disebutkan pada 3 point diatas, yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada dalam garis kehidupan menengah kebawah. Baik itu yang menempati wilayah perkotaan, maupun yang berada di wilayah pedesaan, yang terpencil jauh dari pusat perkotaan/keramaian. Dengan demikian kegiatan proses tersebut bisa dikategorikan kedalam kegiatan yang bersifat mendidik, atau dengan kata lain sebuah kegiatan pendidikan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran/pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan/atau politik sehingga pada akhirnya warga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masyarakat yang berdaya kehidupan lebih baik.

#### **II.2.3.1.2.PentingnyaPemberdayaan Masyarakat.**

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pemikiran tentang pembangunan, dengan berorientasi ekonomi dan terangkum dalam nilai-nilai sosial yakni bersifat people-

centered, participatory, empowering and sustainable. Konsep tersebut bisa lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (basic need) akan tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan dan pemiskinan lebih lanjut (*safety need*). Jika kita mengacu kepada Program yang dicanangkan Pemerintah, sudah pasti pembangunan yang bersifat menyeluruh harus mampu menyentuh hingga level terbawah dan terjauh dari sebuah tatanan kehidupan. Dengan memberdayakan masyarakat diharapkan mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat yang dalam kondisi suatu kondisi mereka tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. melalui kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara kehidupan mampu berdiri sendiri memiliki ketrampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Selain itu diharapkan juga mampu untuk saling bekerja sama dengan individu lain, atau kelompok masyarakat lain dalam upaya mengembangkan sebuah kehidupan disuatu wilayah yang lebih baik.

### **II.2.3.1.3. Unsur Yang Menjadi Sumber Pemberdayaan Masyarakat**

Jika kita berbicara mengenai unsur apa saja yang menjadi sumber bagi Pemberdayaan Masyarakat, tentu kita juga harus melihat apa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Sulistiyani (2004: 80) Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi :

- a. Kemandirian berfikir,
- b. bertindak, dan
- c. Mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Untuk mencapai sebuah kemandirian tersebut tentu diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar secara bertahap, masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari setiap kegiatan belajar tersebut.

Sedangkan tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dalam Christie S (2005: 16) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu :

- a. Ekonomi,
- b. Politik, dan
- c. sosial budaya ;

Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah.

Untuk itulah sehingga Pendidikan menjadi sangat penting mengingat pendidikan memiliki andil yang cukup besar didalam membentuk karakter manusia, beberapa pakar memberikan devinisi tentang pendidikan, seperti Jhon Dewey yang mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental serta intelektual dan emosional kearah alam dan sesama. Sedangkan Rousseau mengatakan bahwa pendidikan adalah member pembekalan yang

tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa. Sementara di Indonesia sendiri Ki Hajar Dewantara memberikan definisi bahwa pendidikan/mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai bagian anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Ahmadi dan Uhbiyati 2015:69).

Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa berarti memberdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat seimbang baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, antara hak dan kewajiban, menjadi warga negara yang bersikap dan berbuat demokratis terhadap sesama manusia menuju masyarakat yang memahami akan hak, kewenangan dan tanggungjawab mereka dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **II.2.3.1.4.Strategi yang Dilakaukan Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasar pendapat Sunyoto Usman (2003 : 40-47 ) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih

dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu ;

- a. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).  
Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan.
- b. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar.
- c. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal pendekatan bottom-up. Pendekatan ini merupakan

upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

### **II.2.3.2. Community Development (Pengembangan**

#### **Masyarakat)**

Menurut Duhnan (Dalam Rukminto, 2003;217-218) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai upaya terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi masyarakat, terutama melalui usaha kooperatif dan mengembangkan kemandirian masyarakat perdesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis pemerintah ataupun lembaga sukarela. Lebih lanjut Dunhan menyatakan ada lima prinsip dasar yang amat penting bagi pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat, yang terkait dengan keseluruhan kehidupan masyarakat.

2. Perlu adanya pendekatan antara tim dalam pengembangan masyarakat.
3. Kebutuhan akan adanya *community worker* yang serba bisa pada wilayah pedesaan.
4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal.
5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Adimihardja, dalam Sudradjat Implementasi program pengembangan masyarakat masih belum dilakukan perpaduan dengan modal sosial berupa nilai kerjasama, jaringan sosial, partisipasi, dan kepercayaan yang sudah lama hidup dan tumbuh ditengah masyarakat lokal. Kolaborasi nilai modern dengan nilai kearifan lokal yang merupakan modal sosial masyarakat setempat akan menjadi suatu kekuatan penting dalam upaya membangun kesadaran bersama untuk kepentingan penerapan Program Gerakan Desa Cerdas. Di satu sisi masyarakat memiliki kekuatan modal sosial yang perlu dikembangkan untuk kemajuan bersama, tetapi disisi lain

pemerintah memiliki program dan materi untuk membangun masyarakat sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya, akan merupakan suatu perpaduan yang dapat ditetapkan dalam program pengembangan masyarakat, sebagaimana dalam Program Gerakan Desa Cerdas yang dilalukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan dinas pendidikan.

#### **II.2.3.2.1.Konteks Pendidikan Dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam konteks pendidikan, pendidikan merupakan sebuah proses bertahap dan berkesinambungan. Pendidikan juga sebagai salah satu bentuk dari sebuah investasi bagimasa depan. Betapa pentingnya pendidikan bagi warga masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sebab keberhasilan pendidikan akan membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan peradaban suatu masyarakat. Namun demikian, pendidikan yang berkualitas baik sesuai dengan cita-cita suatu masyarakat tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat pemberian atau terjadi dengan sendirinya, tanpa ada usaha untuk mewujudkannya. Maka secara aspek sosiologis pada umumnya

masyarakat beserta seluruh warganya berusaha untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang diharapkan akan memberikan hasil sesuai dengan cita-cita. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia telah menandakan perlunya tanggung jawab dan kewajiban pendidikan diletakkan pada semua pihak yang berkepentingan. Salah satu asas pendidikan tersebut adalah “Tri Pusat Pendidikan” yang bermakna, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kenapa demikian ? Karena semua ketiga unsur tersebut merupakan bagian proses dari pendidikan. Untuk itu semua pihak memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan bagi warga masyarakat pada umumnya. Dimana setiap pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda di dalam suatu proses pendidikan. Masyarakat, sekolah, dan keluarga dituntut peran aktif yang nyata dan tidak saling menggantungkan di proses pendidikan tersebut. Partisipasi semua pihak akan terwujud dalam bentuk-bentuk kinerja yang saling mendukung demi terwujudnya cita-cita masyarakat. Dari perspektif ini maka pendidikan sangat berkaitan

dengan sebuah proses kegiatan dalam upaya pemberdayaan suatu masyarakat. Terutama masyarakat yang masuk dalam sebuah kondisi jauh dari kata makmur dan sejahtera. Untuk itulah diperlukan suatu tahapan proses dalam langkah pengembangan bagi pemberdayaan masyarakat tersebut dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

#### 1) Belajar Dari Masyarakat

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat tentu semua unsur adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Berarti dengan sumber daya yang ada pada masyarakat harus mampu dibangun nilai dan relevansi kultur - budaya masyarakat setempat, serta kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi segala macam permasalahannya. Kemudian bagaimana dalam upaya menangani serta mencari jalan keluarnya.

#### 2) Pihak Pendamping

Pendamping dalam kegiatan tersebut harus mampu menjadi fasilitator Masyarakat pun perlu pendamping, agar

masyarakat juga mampu menyadari peran pendamping sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu diperlu sebuah sikap yang baik, serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Dan dalam perannya di masyarakat, masyarakat diberikan porsi dalam mendominasi kegiatan tersebut. Walau peran pendamping memang sangat besar, namun harus mampu menyeimbangkan dan memposisikan diri, agar mampu mengarahkan pada prakarsa kegiatan-kegiatan tersebut pada warga masyarakat itu sendiri.

### 3) Belajar Bersama

Belajar bersama, salah satu dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan suatu kultur budaya masyarakat. Terkadang masyarakat terisolasi dalam sebuah kultur budaya lokal. Terjebak dalam sebuah lingkaran pemikiran kultur budaya yang stagnan, bahkan statis. Hal tersebut tentu memiliki alasan tersendiri, namun bagaimana kultur budaya tersebut

bisa menjadi sebuah sumber daya yang diberdayakan dan dikembangkan, sehingga mampu menopang sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik. Jadi kultur budaya/sumber kearifan lokal bukan berarti tidak harus dibiarkan begitu saja dan tidak berubah dalam konteks pengembangan ( kreatifitas dan inovasi kebudayaan lokal ).

Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2000:181), kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sangskerta ”buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi Koentjaraningrat, mendefinisikan budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Selain itu Culture dari kata Latin colere “mengolah”, “mengerjakan”, dan berhubungan dengan tanah atau bertani sama dengan “kebudayaan”, berkembang menjadi” “segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam”. (Koentjaraningrat. 2003:74)

Untuk itu menurut salah seorang ahli kebudayaan Arnold Joseph Toynbee dari kondisi alam yang baik sehingga menimbulkan lahirnya kebudayaan, dalam perkembangan suatu kebudayaan, yang merupakan kejadian yang digerakkan oleh sebagian kecil dari pihak-pihak kebudayaan itu. Pihak-pihak kebudayaan itu adalah suatu kelompok manusia yang menjadi sebuah masyarakat. Suatu kelompok dalam jumlah kecil (minority) itu menciptakan kebudayaan dari jawaban yang diberikan dan tantangan alam, kemudian ditiru oleh sebagian besar masyarakat (majority). Suatu kebudayaan dikembangkan oleh minority yang kuat dan dapat menciptakan suatu kebudayaan. Suatu kelompok kecil (minority) yang kuat mengembangkan kebudayaan dengan menyebarkan kebudayaan dan mempengaruhi masyarakat untuk meniru kebudayaan yang telah diciptakan minority. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun

sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka.

#### **II.2.4.2. Peran Guru dalam Pendidikan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat**

Seperti yang telah disebutkan pada “Tri Pusat Pendidikan” yang bermakna, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Disamping, pendidikan dasar yang didapatkan melalui pendidikan keluarga, sudah pasti dibutuhkan pihak yang secara khusus mampu memberikan bimbingan, arahan juga pendampingan bagi seluruh warga masyarakat. Dengan latar belakang kondisi masyarakat yang berbeda – beda, sudah pasti secara internal lingkup kecil kehidupan masyarakat, akan mengalami banyak situasi yang tidak memungkinkan untuk memberikan bimbingan, arahan, pendampingan, serta kontrol dan pengawasan terhadap proses perkembangan individu dalam lingkungan terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Sudah selayaknya ada pihak ketiga dalam sebuah

profesi mampu mengambil peran pentingnya bagi lingkungan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut tentu kita bisa lihat bagaimana definisi guru dari beberapa ahli. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, surau, mushala, rumah, dan sebagainya (Syaiful Bahri Djamarah, 2000: 31). Maka guru di jaman sekarang sudah mendapat arti yang luas lagi dalam masyarakat. Semua orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dapat disebut guru. Dalam konteks ini, tentu peranan guru dalam masyarakat berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Di sekolah guru menjadi pengajar, pembimbing serta teladan bagi murid-muridnya. Kemudian di masyarakat guru merupakan figur teladan bagi masyarakat di sekitarnya yang memberikan kontribusi positif dalam norma-norma sosial di masyarakat. Di Negara maju ditempatkan pada kedudukan yang tinggi karena

peranannya sangat penting. Mungkin akan berbeda bila kita lihat di Negara berkembang seperti Indonesia, walau hal ini masih sulit kita temui

Dari segi perubahan sosial, guru yang baik juga harus mampu melaksanakan tugas profesionalnya sebagai seorang guru. Baik di dalam maupun di luar pembelajaran, sehingga guru bisa disebut sebagai *agent of change* yang berperan dalam inovator, motivator, maupun fasilitator. Jadi, jelas bahwa guru merupakan peranan aktif dalam seluruh aktifitas masyarakat secara holistik. Posisi strategis guru di tengah masyarakat idealnya, antara lain:

1. Pendidik

Seorang guru bukan hanya mendidik anak didiknya di sekolah namun seorang guru juga harus memberikan pendidikan umum kepada masyarakat sekitarnya agar apa yang diajarkan kepada siswanya dapat disambut baik dan juga dipahami secara umum oleh masyarakat sekitar. Hal ini

penting untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat pada kemampuan seorang guru.

## 2. Penggerak Potensi

Seorang guru yang dianggap sebagai tokoh penting dalam masyarakat harus menggunakan posisi strategisnya untuk melihat bagaimana potensi yang dimiliki masyarakat sekitarnya. Terlebih jika guru tersebut berada di lingkungan yang minim SDM terpelajarnya. Karena dengan kemampuan seorang guru menilik potensi masyarakat di sekitarnya, akan menjadi modal penting bagi pendidikan di daerah tersebut karena dapat digunakan sebagai arah tujuan kemana peserta didik ini akan diarahkan.

## 3. Manajer

Dianalogikan seperti seorang manajer yang mengatur jalannya tahapan-tahapan teknis dalam perencanaan. Begitu pula fungsi guru dalam masyarakat sebagai pengatur arahnya pendidikan baik terhadap peserta didik secara langsung dan masyarakat di sekitarnya secara tidak langsung. Seorang guru harus mampu mengajak masyarakat yang heterogen

untuk melakukan fungsi masyarakatnya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena tidak semua masyarakat tahu bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya.

#### 4. Penengah Konflik

Masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya yang berbeda biasanya akan memiliki tingkat ego yang berbeda. Masalah akan muncul ketika ego di sini bertentangan dan konflik baru. Disini peran guru sebagai penengah konflik yaitu mampu mencari solusi dari permasalahan yang ada dengan kepala dingin, mengedepankan akal dan hati dari pada nafsu amarah, mengutamakan pendekatan psikologi persuasif daripada emosional oportunistis sangat dinantikan demi tercapainya kerukunan warga.

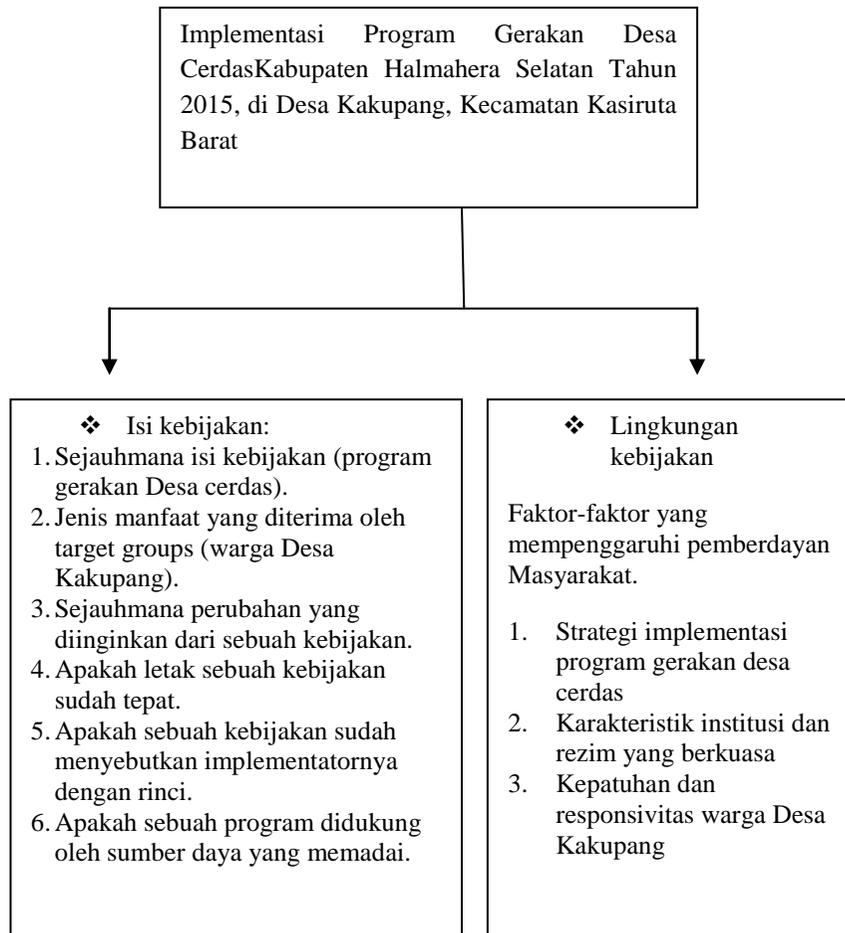
#### 5. Pemimpin kultural

Peran-peran diatas dengan sendirinya menempatkan seorang gurusebagai pemimpin yang lahir dan muncul dari bawah secara alami, bakat, potensi, aktualisasi, dan kontribusi besarnya dalam pemberdayaan potensi masyarakat. Seorang

guru lebih enjoy bersama rakyat yang bebas dari kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

### II.3. KERANGKA PEMIKIRAN

#### Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan



## **II.4 DEFINISI KONSEPSIONAL**

1. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah kebijakan secara efektif, guna mencapai tujuan sebuah program atau kebijakan secara maksimal. Proses implementasi dalam keadaan yang sesungguhnya dapat berhasil maupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai atau outcomes unsur yang mempengaruhinya dapat bersifat mendukung maupun menghambat sasaran program.
2. Pengembangan masyarakat sebagai upaya terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi masyarakat, terutama melalui usaha kooperatif dan mengembangkan kemandirian masyarakat perDesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis Pemerintah ataupun lembaga sukarela.
3. Program Gerakan Desa Cerdas adalah program pemberdayaan masyarakat dengan Visi “Terwujudnya gotong royong demi Halmahera Selatan cerdas”. Tujuannya adalah untuk mengisi kekurangan guru

berkualitas yang mampu mendidik siswa dan memunculkan potensi siswa. Fokus dan tujuan gerakan Desa cerdas adalah merekrut, menyeleksi dan melatih pemuda-pemudi terbaik bangsa dari berbagai latar belakang keilmuan untuk ditugaskan mengajar di Sekolah Dasar dan melakukan advokasi pendidikan selama satu tahun di Desa-Desa yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Gerakan ini menjadi wahana belajar kepemimpinan bagi pemuda penggerak Desa.

## **I.5 DEFINISI OPERASIONAL**

### **I.5.1. Isi kebijakan:**

1. Sejuahmana isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups.
3. Sejuahmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat.

5. Apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan implementasinya dengan rinci.

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

### **I.5.2. faktor-faktor yang mempengaruhi**

1. Strategi implementasi program gerakan desa cerdas
2. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa
3. Kepatuhan dan responsivitas warga Desa Kakupang